Mapaccing:
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Volume 01, Issue. 02, Oktober 2026, Page 44 - 59
eISSN : 1234- 5678 DOI : 10.123456/Mapaccing.
Website: https://ejournals-glm.id/index.php/mapaccing

POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA MISKIN DI WILAYAH PERKOTAAN

Puspa Dewangga[1]
[1]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
email: puspadewangga@gmail.com

Abstract
Urban poverty in Indonesia is often seen as less severe than rural poverty, although poor urban households face high living costs and rising food prices. This study aims to describe the trend of consumption patterns of poor households in urban Indonesia, using provincial capitals as the reference area and comparing them with surrounding regencies. The study applies a descriptive quantitative design using Susenas consumption expenditure publications for March 2010 to March 2026. Urban areas of each province serve as a proxy for the provincial capital, rural areas serve as a proxy for surrounding regencies, and the lowest expenditure groups represent poor households. The results show that throughout 2017 to 2026 the food expenditure share in every province is lower in the capital proxy than in surrounding regencies, while the average gap narrows from 10.8 to 9.1 percentage points because the urban food share rises, particularly in Sulawesi. Poor households allocate more than 60 percent of spending to food, depend on rice whose price jumped in 2024, and spend more on cigarettes than on any single animal protein group, with cigarettes absorbing 11.2 percent of food spending in the lowest quintile against 6.5 percent for fish. These findings provide a cross-provincial trend mapping that can guide regional social protection, food price stabilization, and tobacco control policies.

Keyword: *consumption pattern, food expenditure share, urban poor households*

Abstrak
Kemiskinan perkotaan di Indonesia kerap dipandang lebih ringan daripada kemiskinan perdesaan, padahal rumah tangga miskin di kota menghadapi biaya hidup tinggi dan kenaikan harga pangan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tren pola konsumsi rumah tangga miskin di wilayah perkotaan Indonesia dengan menjadikan ibu kota provinsi sebagai acuan dan membandingkannya dengan kabupaten di sekitarnya. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif berbasis publikasi pengeluaran untuk konsumsi penduduk hasil Susenas Maret 2010 sampai Maret 2026. Wilayah perkotaan setiap provinsi digunakan sebagai proksi ibu kota provinsi, wilayah perdesaan sebagai proksi kabupaten sekitarnya, dan kelompok pengeluaran terbawah sebagai proksi rumah tangga miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang 2017 sampai 2026 pangsa pengeluaran pangan di setiap provinsi selalu lebih rendah pada proksi ibu kota daripada kabupaten sekitarnya, dengan selisih rata-rata yang menyempit dari 10,8 menjadi 9,1 poin persen karena pangsa pangan perkotaan naik, terutama di Sulawesi. Rumah tangga miskin membelanjakan lebih dari 60 persen pengeluarannya untuk pangan, bergantung pada beras yang harganya melonjak pada 2024, dan membelanjakan lebih banyak untuk rokok daripada untuk setiap kelompok protein hewani, dengan pangsa rokok 11,2 persen pengeluaran pangan kuintil terbawah dibandingkan 6,5 persen untuk ikan. Temuan ini memberikan pemetaan tren lintas provinsi sebagai acuan kebijakan perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, dan pengendalian rokok di daerah.

Kata Kunci: *pangsa pengeluaran pangan, pola konsumsi, rumah tangga miskin perkotaan*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia lebih sering dibicarakan sebagai persoalan perdesaan karena persentasenya memang lebih tinggi. Data Maret 2026 mencatat persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 10,67 persen, sedangkan di perkotaan 6,34 persen. Namun, rumah tangga miskin di kota memenuhi hampir seluruh kebutuhannya melalui pasar dengan biaya hunian, transportasi, dan pangan yang relatif mahal, sehingga persentase yang lebih kecil tidak berarti beban hidupnya lebih ringan.

Pola konsumsi merupakan cermin paling langsung dari kesejahteraan rumah tangga, karena pengeluaran konsumsi menunjukkan cara rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar pangan dan bukan pangan (Kinanti et al., 2024). Semakin besar porsi pengeluaran untuk pangan, semakin rendah pula akses rumah tangga terhadap pangan dan kepemilikan kekayaan lain (Hartari, 2016). Pola konsumsi perkotaan juga berubah cepat, karena elastisitas pendapatan tertinggi di Indonesia terdapat pada restoran dan katering (Rossita et al., 2026), sementara pilihan pangan keluarga miskin perkotaan dibentuk oleh iklan makanan olahan dan gerai waralaba (Alim et al., 2023).

Di sisi lain, rumah tangga miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan pokok. Kenaikan harga beras membuat masyarakat miskin mengurangi konsumsi beras sekaligus mengurangi pembelian kebutuhan lain (Habriyanto et al., 2023). Kajian pola konsumsi rumah tangga miskin di Indonesia umumnya dilakukan pada satu kabupaten (Wahyuningsih et al., 2017) atau membandingkan perkotaan dan perdesaan dalam satu provinsi (Abdillah et al., 2019). Belum banyak kajian yang memetakan pola konsumsi rumah tangga miskin perkotaan di seluruh provinsi dan membandingkannya dengan kabupaten di sekitarnya. Perbandingan spasial ini penting karena rumah tangga di ibu kota provinsi memenuhi hampir seluruh kebutuhannya melalui pasar dan menanggung biaya hunian serta transportasi yang lebih tinggi, sehingga ruang anggaran untuk pangan dapat tertekan walaupun pengeluaran nominalnya lebih besar daripada wilayah penyangga di sekitarnya. Pada rumah tangga miskin kota, tekanan tersebut cenderung diatasi dengan memilih pangan yang murah dan praktis tetapi kurang bergizi (Alim et al., 2023), sehingga pemetaan alokasi pangan dan bukan pangan antarwilayah sekaligus menjadi penanda awal kerentanan gizi rumah tangga miskin perkotaan.

Penelitian ini menjadikan ibu kota provinsi sebagai acuan wilayah perkotaan dan membandingkannya dengan kabupaten di sekitarnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat dan struktur pengeluaran konsumsi di ibu kota provinsi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, dan bagaimana pola konsumsi kelompok pengeluaran terbawah yang mewakili rumah tangga miskin selama 2010 sampai 2026. Tujuannya adalah mendeskripsikan pola konsumsi rumah tangga miskin di wilayah perkotaan Indonesia secara menyeluruh dan merumuskan implikasi kebijakannya bagi pemerintah daerah.

2. LANDASAN TEORI DAN PROPOSISI

Teori Konsumsi dan Hukum Engel

Hukum Engel menyatakan bahwa ketika pendapatan rumah tangga meningkat, proporsi pengeluaran untuk pangan menurun walaupun nilai absolutnya bertambah.

Keteraturan ini telah diuji pada data anggaran rumah tangga dari banyak negara dan menjadi salah satu hubungan empiris paling stabil dalam ilmu ekonomi (Houthakker, 1957). Karena itu, pangsa pengeluaran pangan lazim dipakai sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga.

Pangsa anggaran setiap kelompok barang tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh harga relatif antarbarang (Deaton & Muellbauer, 1980). Kenaikan harga pangan pokok dapat menahan atau menaikkan pangsa pangan walaupun pengeluaran nominal meningkat. Inflasi dan fluktuasi pendapatan juga mendorong rumah tangga memusatkan konsumsinya pada kebutuhan pokok (Akhmadi & Engkur, 2026). Pada rumah tangga berpendapatan sangat rendah, konsumsi pangan pokok sudah mendekati batas kebutuhan minimum sehingga sulit dikurangi ketika harganya naik, dan permintaannya menjadi sangat inelastis (Jensen & Miller, 2008). Akibatnya, guncangan harga pangan pokok hampir tidak diikuti penyesuaian kuantitas, sehingga pangsa pangan menjadi kaku atau justru naik walaupun pengeluaran nominal bertambah. Fenomena kekakuan pangsa pangan ini menjadi dasar untuk membaca pangsa pangan rumah tangga miskin pada periode kenaikan harga beras.

Pertumbuhan ekonomi mengubah struktur konsumsi dari pangan pokok menuju pangan olahan, jasa, dan perumahan. Pengalaman Jepang dan negara industri baru Asia menunjukkan pergeseran budaya dari berorientasi produksi menjadi berorientasi konsumsi (Soliman, 1994), sedangkan di Tiongkok reformasi ekonomi menjadikan pembelian rumah sebagai pos konsumsi utama rumah tangga perkotaan (Li, 2002). Masyarakat perkotaan di Indonesia juga mengalokasikan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk barang bukan pangan dibandingkan masyarakat perdesaan (Hartari, 2016).

Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin

Rumah tangga miskin membelanjakan sebagian besar anggarannya untuk pangan, tetapi tetap mengalokasikan bagian yang tidak kecil untuk tembakau dan perayaan (Banerjee & Duflo, 2007). Di Indonesia, rumah tangga termiskin lebih bergantung pada pangan pokok dan tembakau, sedangkan rumah tangga terkaya membelanjakan lebih banyak untuk daging (Pangaribowo & Tsegai, 2011). Rumah tangga miskin di Simalungun juga membelanjakan lebih banyak untuk pangan daripada bukan pangan (Hasibuan, 2016).

Pola konsumsi rumah tangga miskin dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi. Pada rumah tangga berpendapatan rendah di Malaysia, urbanisasi, ukuran rumah tangga, status lanjut usia, dan status kepemilikan rumah memengaruhi pola konsumsi (Ismail et al., 2023). Di Thailand, wilayah tempat tinggal, susunan anggota, pendidikan, dan pendapatan membentuk pola konsumsi yang berbeda-beda (Manajit et al., 2020).

Rumah tangga miskin juga menghadapi tekanan utang. Pada rumah tangga miskin penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Semarang, utang memotong pendapatan untuk konsumsi, sekolah, dan modal usaha (Arif & Sabilla, 2021). Tekanan seperti ini membuat pola konsumsi rumah tangga miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan.

Kerangka Pemikiran dan Proposisi Penelitian

Pola konsumsi rumah tangga miskin dibentuk oleh tiga faktor, yaitu pendapatan dan harga, karakteristik wilayah, serta posisi rumah tangga dalam distribusi pengeluaran. Pola

konsumsi diamati melalui pangsa pangan, komposisi pangan, dan komposisi pengeluaran bukan pangan, lalu digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ibu kota provinsi dan kabupaten sekitarnya, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.

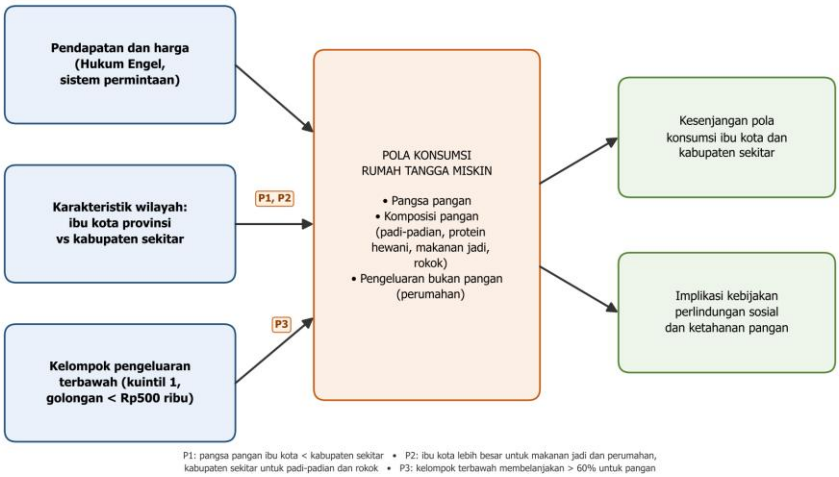

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: dikembangkan oleh penulis (2026)

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, hipotesis dirumuskan sebagai proposisi yang diperiksa melalui pola data. Proposisi pertama, pangsa pangan di ibu kota provinsi lebih rendah daripada di kabupaten sekitarnya. Proposisi kedua, ibu kota provinsi mengalokasikan pangsa lebih besar untuk makanan jadi dan perumahan, sedangkan kabupaten sekitar untuk padi-padian dan rokok.

Proposisi ketiga, kelompok pengeluaran terbawah membelanjakan lebih dari 60 persen pengeluarannya untuk pangan. Ketiga proposisi ini diperiksa dengan membandingkan indikator konsumsi antarwilayah dan antarkelompok pengeluaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan analisis tren dan perbandingan antarwilayah. Data sekunder diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik tentang pengeluaran untuk konsumsi penduduk hasil Susenas Maret 2010 sampai 2026, berupa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas, provinsi, dan klasifikasi perkotaan atau perdesaan. Unit analisis adalah 38 provinsi yang diamati trennya selama 2017 sampai 2026, dilengkapi tren nasional 2010 sampai 2026. Rata-rata antarprovinsi setiap tahun dihitung dari provinsi yang memiliki data perkotaan dan perdesaan pada tahun tersebut, tanpa DKI Jakarta yang tidak memiliki wilayah perdesaan; empat provinsi hasil pemekaran di Papua (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya) baru tersedia sejak 2024. Perubahan 2017 sampai 2026 menurut provinsi hanya dihitung pada 31 provinsi yang batas wilayahnya tidak berubah, yaitu tanpa DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, dan keempat provinsi tersebut, agar jumlah observasi pada awal dan akhir periode sama.

Karena data per kabupaten dan kota tidak tersedia dalam publikasi tersebut, ibu kota provinsi didekati dengan wilayah perkotaan setiap provinsi dan kabupaten sekitarnya dengan wilayah perdesaan provinsi yang sama. Proksi ini memiliki keterbatasan karena wilayah perkotaan juga mencakup kota lain, beberapa ibu kota provinsi seperti Tanjung Selor, Mamuju, Sofifi, Manokwari, Merauke, Nabire, dan Wamena berada di wilayah kabupaten, dan DKI Jakarta tidak memiliki wilayah perdesaan. Rumah tangga miskin didekati dengan dua ukuran. Pertama, proporsi penduduk berpengeluaran di bawah Rp500 ribu per kapita sebulan pada 2010 sampai 2021, yaitu golongan pengeluaran terbawah yang tersedia menurut provinsi dan klasifikasi perkotaan atau perdesaan. Kedua, kuintil 1 pada 2024 sampai 2026, yang dalam publikasi hanya tersedia sebagai angka nasional gabungan perkotaan dan perdesaan. Tahun 2022 dan 2023 tidak disertakan dalam analisis kelompok berpengeluaran rendah karena publikasi kedua tahun tersebut tidak menyajikan golongan pengeluaran yang sebanding dengan batas Rp500 ribu maupun pangsa pangan menurut kuintil. Batas Rp500 ribu tidak dideflasikan dengan IHK karena publikasi hanya menyajikan golongan dengan batas nominal tetap yang tidak dapat dikelompokkan ulang tanpa data mikro. Batas ini mendekati garis kemiskinan nasional Maret 2021 sebesar Rp472.525 per kapita sebulan (Badan Pusat Statistik, 2021b), sehingga pada akhir periode golongan tersebut mendekati penduduk miskin, sedangkan pada awal periode cakupannya jauh lebih luas.

Indikator yang dianalisis meliputi pangsa pengeluaran pangan, pangsa tiap kelompok komoditas, harga implisit beras, dan proporsi penduduk berpengeluaran rendah, serta selisih indikator antara ibu kota provinsi dan kabupaten sekitarnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan tren indikator antarwilayah dan menghitung perubahan serta selisih rata-rata antarprovinsi, lalu disajikan dalam grafik perbandingan. Seluruh nilai rupiah merupakan harga berlaku. Untuk membedakan kenaikan harga riil dari inflasi umum, kenaikan harga implisit beras dibandingkan dengan inflasi kumulatif IHK yang dihitung dari inflasi tahunan bulan Maret 2018 sampai 2026 yang dirilis BPS, dan setiap angka diperiksa dengan mencocokkan jumlah rincian komoditas terhadap total pada tabel sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tren Pangsa Pangan Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Sekitarnya

Secara nasional, pangsa pangan perkotaan sebagai proksi ibu kota provinsi selalu lebih rendah daripada perdesaan sebagai proksi kabupaten sekitarnya selama 2010 sampai 2026 (Gambar 2). Pangsa pangan perkotaan bergerak datar di kisaran 45 sampai 47 persen, kecuali penurunan sesaat pada 2015 dan 2016, sedangkan pangsa pangan perdesaan bergerak di kisaran 55 sampai 59 persen. Selisih keduanya menyempit dari 12,67 menjadi 11,00 poin persen, padahal pengeluaran per kapita perkotaan terus naik, sehingga kenaikan pengeluaran nominal belum diikuti pergeseran konsumsi dari pangan ke bukan pangan.

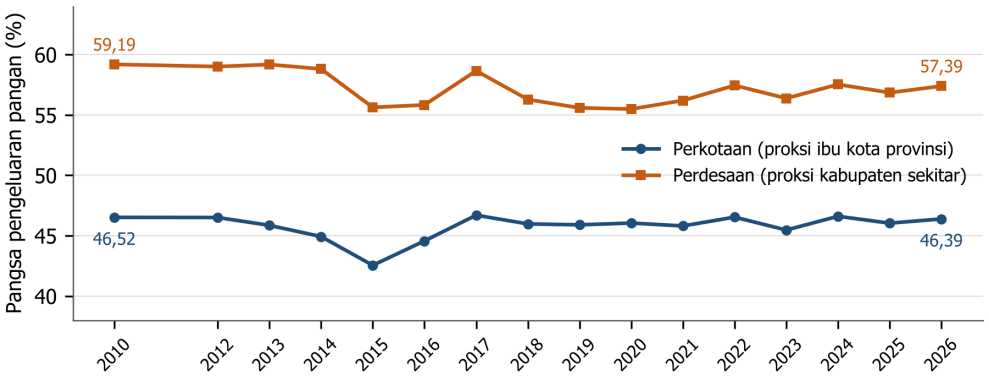

Gambar 2. Tren Pangsa Pengeluaran Pangan Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Sekitarnya, Indonesia, 2010–2026 (%)

Sumber: Susenas Maret 2010–2026 (Badan Pusat Statistik, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), data diolah

Pola yang sama terlihat di setiap provinsi. Gambar 3 menyajikan rata-rata pangsa pangan selama 2017 sampai 2026 untuk seluruh provinsi. Selama periode tersebut, pangsa pangan ibu kota provinsi selalu berada di bawah kabupaten sekitarnya pada seluruh provinsi dan seluruh tahun pengamatan. Selisih rata-rata antarprovinsi menyempit dari 10,83 poin persen pada 2017 menjadi 9,06 poin persen pada 2026, dan menyempit pada 24 dari 31 provinsi yang batas wilayahnya tidak berubah. Penyempitan ini terutama terjadi karena pangsa pangan kabupaten sekitar turun pada 23 provinsi, sementara pangsa pangan ibu kota justru naik pada 17 provinsi.

Kenaikan pangsa pangan ibu kota paling tajam terjadi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, yaitu Makassar (naik 3,67 poin), Kendari (3,02 poin), Mataram (2,27 poin), Palu (2,25 poin), dan Gorontalo (2,08 poin). Di Kendari, pangsa pangan naik terus dari 42,21 persen pada 2019 menjadi 45,59 persen pada 2026. Secara rata-rata selama periode pengamatan, selisih terlebar terdapat di Nabire (15,16 poin), Serang (13,93 poin), Jayapura (13,92 poin), dan Kupang (13,84 poin), sedangkan selisih tersempit terdapat di Sorong (3,64 poin) dan Mataram (5,10 poin).

Angka utama provinsi kunci dirangkum pada Tabel 1, yang menunjukkan bahwa lima ibu kota dengan kenaikan pangsa pangan tertinggi seluruhnya berada di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1. Ringkasan Rata-rata Pangsa Pengeluaran Pangan Provinsi Terpilih, 2017–2026 (%)

Ibu kota (provinsi)	Ibu kota	Kabupaten sekitar	Selisih (poin)	Perubahan pangsa pangan ibu kota 2017–2026 (poin)
Nabire (Papua Tengah)*	49,4	64,6	15,2	–
Serang (Banten)	47,2	61,2	13,9	–
Jayapura (Papua)	46,4	60,3	13,9	–
Kupang (Nusa Tenggara Timur)	46,9	60,7	13,8	–
Gorontalo (Gorontalo)	42,7	53,2	10,5	+2,08
Palu (Sulawesi Tengah)	45,4	54,9	9,5	+2,25
Kendari (Sulawesi Tenggara)	43,6	52,4	8,8	+3,02
Makassar (Sulawesi Selatan)	45,0	53,4	8,4	+3,67
Mataram (Nusa Tenggara Barat)	52,9	58,0	5,1	+2,27
Sorong (Papua Barat Daya)*	47,2	50,9	3,6	–

*Sumber: Susenas Maret 2017–2026, data diolah (Gambar 3). Tanda * menunjukkan rata-rata 2024–2026 untuk provinsi hasil pemekaran; tanda – menunjukkan provinsi yang tidak termasuk lima kenaikan tertinggi atau batas wilayahnya berubah. Selisih dihitung sebelum pembulatan.*

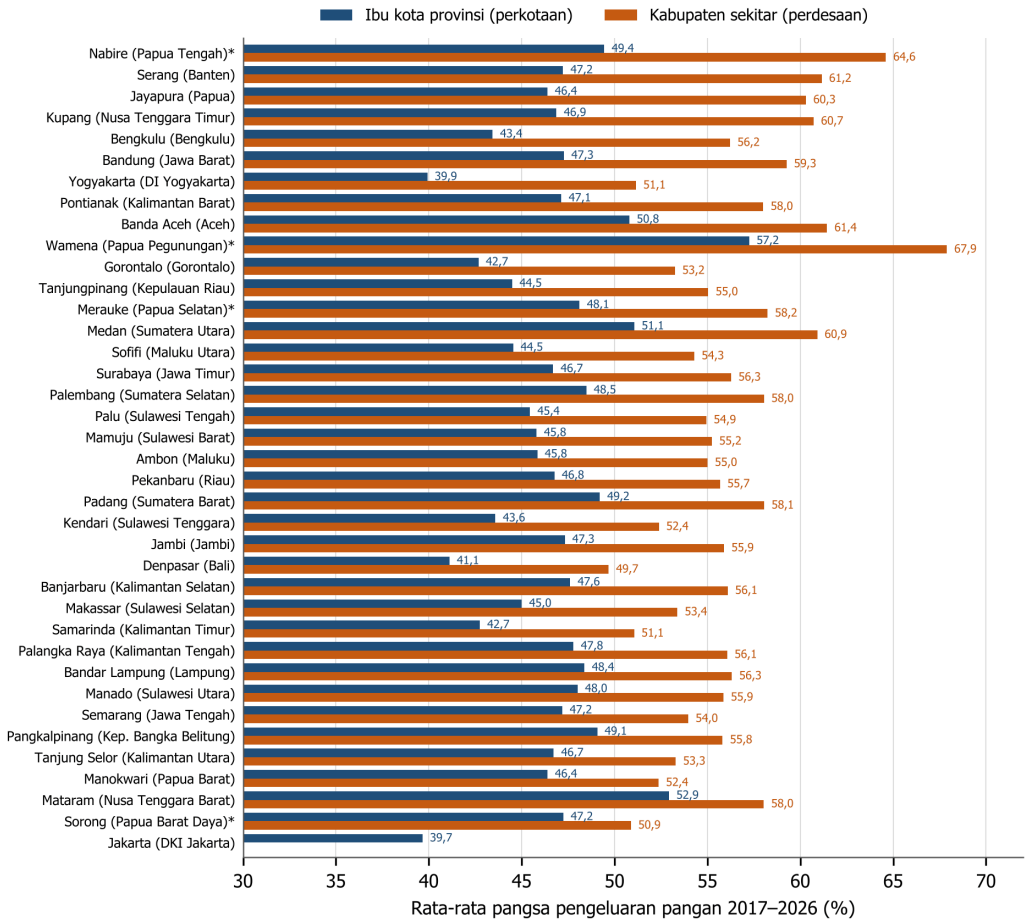

Gambar 3. Rata-rata Pangsa Pengeluaran Pangan Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Sekitarnya menurut Provinsi, 2017–2026 (%)

*Sumber: Susenas Maret 2017–2026 (Badan Pusat Statistik, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026), data diolah. Diurutkan dari selisih terbesar; tanda * menunjukkan rata-rata 2024–2026 untuk provinsi hasil pemekaran; Papua dan Papua Barat sebelum 2024 mencakup wilayah sebelum pemekaran; DKI Jakarta tidak memiliki wilayah perdesaan*

Tren Komposisi Konsumsi

Komposisi konsumsi ibu kota provinsi dan kabupaten sekitarnya berbeda secara konsisten selama 2017 sampai 2026 (Gambar 4). Makanan dan minuman jadi menyerap 34 sampai 39 persen pengeluaran pangan di ibu kota, jauh di atas kabupaten sekitar yang 25 sampai 28 persen, walaupun jaraknya menyempit dari 11,6 menjadi 9,0 poin persen. Sebaliknya, padi-padian menyerap 13 sampai 16 persen pengeluaran pangan di kabupaten sekitar dan 9 sampai 11 persen di ibu kota, dengan lonjakan pada 2024 di kedua wilayah. Pangsa rokok di kabupaten sekitar bertahan di kisaran 7,8 sampai 8,6 persen dari total pengeluaran, sekitar 1,6 sampai 1,7 kali ibu kota, sedangkan pangsa perumahan di ibu kota bertahan di kisaran 26 sampai 29 persen.

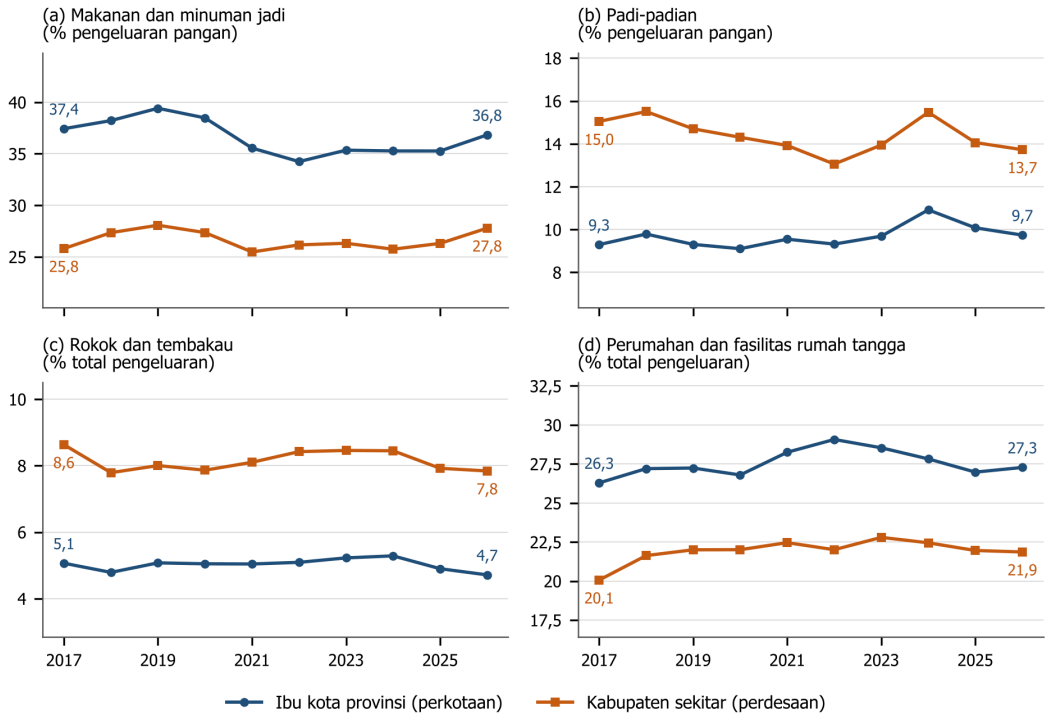

Gambar 4. Tren Komposisi Pengeluaran Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Sekitarnya, Indonesia, 2017–2026 (%)

Sumber: Susenas Maret 2017–2026 (Badan Pusat Statistik, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), data diolah. Panel (a) dan (b) dihitung terhadap pengeluaran pangan, sedangkan panel (c) dan (d) terhadap total pengeluaran

Perbandingan pengeluaran rokok dan protein hewani disajikan pada Tabel 2. Pada Maret 2024, rokok dan tembakau menyerap 11,16 persen pengeluaran pangan kuintil 1, lebih besar daripada setiap kelompok protein hewani, yaitu ikan, udang, cumi, dan kerang (6,47 persen), daging (3,34 persen), serta telur dan susu (4,46 persen). Gabungan ketiganya (14,27 persen) masih di atas rokok, tetapi selisihnya hanya 3,11 poin, jauh lebih sempit

daripada kuintil 5 (19,57 persen berbanding 11,38 persen) (Badan Pusat Statistik, 2024b). Menurut wilayah, rokok menyerap 14,69 persen pengeluaran pangan di kabupaten sekitar, mendekati gabungan protein hewani (16,56 persen), sedangkan di ibu kota 11,34 persen berbanding 18,12 persen. Ikan merupakan kelompok protein hewani dengan pangsa terbesar pada semua kelompok, termasuk kuintil 1. Data Maret 2026 menunjukkan pola serupa secara nasional, dengan pengeluaran rokok Rp94.180 per kapita sebulan, di atas ikan (Rp63.533), telur dan susu (Rp44.915), dan daging (Rp40.352) (Badan Pusat Statistik, 2026).

Tabel 2. Pangsa Protein Hewani, Rokok, dan Komoditas Utama menurut Wilayah dan Kuintil Pengeluaran, Maret 2024 (% pengeluaran pangan)

Kelompok komoditas	Ibu kota (perkotaan)	Kabupaten sekitar (perdesaan)	Kuintil 1	Kuintil 5
Ikan/udang/cumi/kerang	7,45	8,04	6,47	7,91
Daging	5,19	4,28	3,34	6,01
Telur dan susu	5,48	4,24	4,46	5,65
Jumlah protein hewani	**18,12**	**16,56**	**14,27**	**19,57**
Rokok dan tembakau	11,34	14,69	11,16	11,38
Padi-padian	10,92	15,47	21,83	8,38
Makanan dan minuman jadi	35,28	25,74	25,41	36,25

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024b), data diolah. Kuintil merupakan angka nasional; pengeluaran pangan mencakup rokok sesuai klasifikasi BPS.

Tren beras menjelaskan lonjakan pangsa padi-padian pada 2024 (Gambar 5). Harga implisit beras naik dari sekitar Rp8.600 per kg pada 2017 menjadi sekitar Rp13.900 per kg pada 2026 di kedua wilayah, dengan lonjakan 21 sampai 23 persen hanya pada 2024. Pada periode yang sama, konsumsi beras per kapita turun dari 6,07 menjadi 5,84 kg per bulan di ibu kota dan dari 7,48 menjadi 6,89 kg di kabupaten sekitar, sehingga kenaikan pengeluaran beras sepenuhnya didorong oleh harga. Kenaikan harga implisit beras sebesar 61,6 persen selama 2017 sampai 2026 jauh melampaui inflasi umum kumulatif sekitar 28,4 persen, sehingga harga riil beras naik sekitar 26 persen, dan lonjakan 2024 jauh di atas inflasi tahunan Maret 2024 sebesar 3,05 persen. Dari 2023 ke 2024, konsumsi beras per kapita turun sekitar 2,4 persen di ibu kota dan 1,8 persen di kabupaten sekitar, sehingga elastisitas harga implisitnya hanya sekitar −0,1 (sangat inelastis) dan pengeluaran beras nominal per kapita naik sekitar 19 sampai 20 persen.

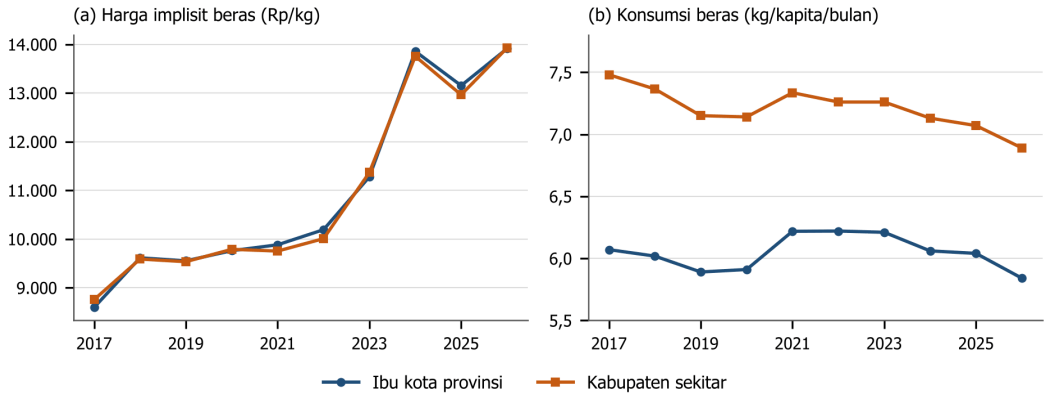

Gambar 5. Tren Harga Implisit dan Konsumsi Beras per Kapita, Indonesia, 2017–2026

Sumber: Susenas Maret 2017–2026 (Badan Pusat Statistik, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026), data diolah. Harga implisit = pengeluaran dibagi kuantitas

Tren Kelompok Berpengeluaran Rendah

Proporsi penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp500 ribu sebulan turun tajam selama 2010 sampai 2021, dari 53,78 menjadi 10,18 persen di ibu kota dan dari 80,18 menjadi 18,74 persen di kabupaten sekitar (Gambar 6a). Di Sulawesi Tenggara, proporsi tersebut turun dari 45,8 persen pada 2010 menjadi 16,35 persen pada 2021 di Kendari dan dari 81,1 persen menjadi 28,94 persen di kabupaten sekitarnya. Penurunan di Kendari sekitar 29 poin, jauh lebih kecil daripada rata-rata ibu kota provinsi secara nasional yang turun 43,6 poin, sehingga Kendari yang pada 2010 berada di bawah angka nasional justru berada di atasnya pada 2021. Karena batas golongan bersifat nominal, penurunan ini sebagian mencerminkan inflasi sehingga lebih tepat dibaca sebagai perbandingan relatif antarwilayah.

Di sisi lain, pangsa pangan kelompok termiskin justru meningkat (Gambar 6b). Pangsa pangan kuintil 1 naik dari 63,17 persen pada 2024 menjadi 64,60 persen pada 2026, sedangkan kuintil 5 turun dari 40,48 menjadi 39,21 persen, sehingga jarak keduanya melebar dari 22,69 menjadi 25,39 poin persen. Angka kuintil ini merupakan angka nasional gabungan perkotaan dan perdesaan karena publikasi tidak memisahkan kuintil menurut klasifikasi wilayah, sehingga dibaca sebagai gambaran kelompok termiskin secara umum, bukan khusus rumah tangga miskin perkotaan.

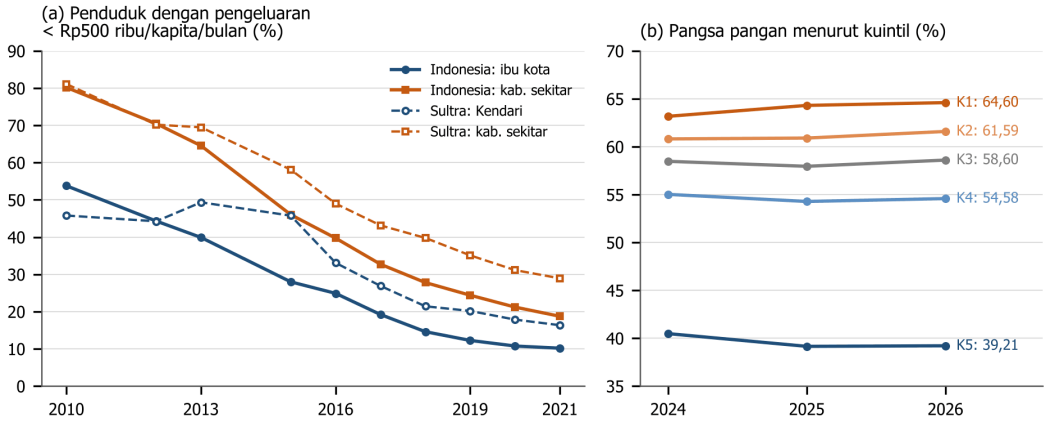

Gambar 6. Tren Kelompok Berpengeluaran Rendah dan Pangsa Pangan menurut Kuintil
Sumber: Susenas Maret 2010–2026 (Badan Pusat Statistik, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025, 2026), data diolah

PEMBAHASAN

Kesenjangan Pangsa Pangan yang Menyempit

Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, pangsa pangan ibu kota provinsi selalu lebih rendah daripada kabupaten sekitarnya di setiap provinsi dan setiap tahun, sehingga proposisi pertama terpenuhi. Kedua, selisih tersebut menyempit, tetapi penyempitan ini lebih banyak disebabkan oleh naiknya pangsa pangan di ibu kota, terutama di Sulawesi dan Nusa Tenggara, daripada membaiknya kesejahteraan di kabupaten sekitar.

Temuan pertama sejalan dengan Hukum Engel yang menghubungkan pendapatan yang lebih tinggi dengan pangsa pangan yang lebih rendah (Houthakker, 1957). Pola serupa ditemukan di Jawa Tengah, tempat pangsa konsumsi pangan perkotaan lebih rendah daripada perdesaan (Abdillah et al., 2019), dan di Malaysia, tempat urbanisasi memengaruhi struktur pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah (Ismail et al., 2023). Temuan kedua dapat dijelaskan oleh kerangka sistem permintaan, karena kenaikan harga pangan yang lebih cepat daripada harga barang lain menahan atau menaikkan pangsa pangan walaupun pengeluaran nominal meningkat (Deaton & Muellbauer, 1980). Inflasi dan fluktuasi pendapatan juga mendorong rumah tangga memusatkan konsumsinya pada kebutuhan pokok (Akhmadi & Engkur, 2026), sehingga naiknya pangsa pangan di Makassar, Kendari, dan Palu menandakan tekanan daya beli pada rumah tangga perkotaan, bukan sekadar perubahan selera.

Makanan Jadi dan Perumahan di Ibu Kota Provinsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang periode pengamatan rumah tangga di ibu kota provinsi membelanjakan sekitar sepertiga pengeluaran pangannya untuk makanan jadi dan lebih dari seperempat total pengeluarannya untuk perumahan, lebih tinggi daripada kabupaten sekitar, sehingga proposisi kedua terpenuhi. Pangsa makanan jadi di ibu kota sempat turun pada 2021 dan 2022 lalu pulih, sedangkan di kabupaten sekitar perlahan naik sehingga jaraknya menyempit.

Pola ini sejalan dengan temuan bahwa elastisitas pendapatan pangan di Indonesia tertinggi pada restoran dan katering (Rossita et al., 2026), sehingga makanan jadi banyak

dikonsumsi oleh rumah tangga berpendapatan lebih tinggi. Di negara maju, kemakmuran juga mendorong konsumsi pangan ultra-olahan dan pangan hewani (Barrahmoune & Matanle, 2026). Meskipun demikian, keluarga miskin perkotaan di Makassar tetap terpapar pangan olahan melalui iklan dan gerai waralaba (Alim et al., 2023), dan kebiasaan makan yang tidak sehat di perkotaan berisiko menimbulkan kelebihan berat badan dan obesitas (Hartari, 2016). Tingginya pangsa perumahan di ibu kota juga sejalan dengan pengalaman Tiongkok, tempat hunian menjadi pos konsumsi utama rumah tangga perkotaan (Li, 2002), serta dengan pergeseran budaya menuju konsumsi seiring pertumbuhan ekonomi di Jepang dan negara industri baru Asia (Soliman, 1994).

Beras, Rokok, dan Kerentanan Kelompok Termiskin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangsa pangan kuintil 1 bertahan di atas 63 persen dan terus naik, sehingga proposisi ketiga terpenuhi. Kenaikan pengeluaran beras sepenuhnya didorong oleh harga karena kuantitas konsumsinya turun, dan pangsa rokok di kabupaten sekitar bertahan sekitar 1,6 sampai 1,7 kali ibu kota sepanjang periode pengamatan.

Pada kuintil 1, pangsa rokok lebih besar daripada setiap kelompok protein hewani dan mencapai hampir empat perlima dari gabungan ikan, daging, telur, dan susu (Tabel 2). Dengan permintaan beras yang sangat inelastis, kenaikan harga beras dan belanja rokok yang bertahan sama-sama menekan anggaran lauk hewani, sesuai dengan efek desakan (crowding-out) rokok terhadap pangan bergizi (Swarnata et al., 2024).

Ketergantungan pada beras membuat kelompok termiskin sangat rentan, karena ketika harga beras naik masyarakat miskin mengurangi konsumsi beras sekaligus kebutuhan lain (Habriyanto et al., 2023). Data garis kemiskinan Maret 2026 juga menempatkan beras dan rokok kretek filter sebagai dua penyumbang terbesar garis kemiskinan perkotaan, masing-masing sekitar 20,52 persen dan 10,83 persen. Tingginya pangsa rokok sejalan dengan temuan bahwa rumah tangga miskin tetap membelanjakan bagian anggaran yang besar untuk tembakau (Banerjee & Duflo, 2007) dan bahwa rumah tangga termiskin di Indonesia bergantung pada pangan pokok dan tembakau (Pangaribowo & Tsegai, 2011).

Pengeluaran rokok mengurangi pangsa anggaran untuk pangan pokok, sayur dan buah, susu, serta pendidikan, termasuk pada rumah tangga berpendapatan rendah (Swarnata et al., 2024). Pada keluarga miskin perkotaan di Indonesia, kebiasaan merokok ayah bahkan berhubungan dengan risiko kekurangan gizi pada anak (Semba et al., 2007). Kerentanan ini diperberat oleh beban utang rumah tangga miskin (Arif & Sabilla, 2021) dan oleh karakteristik rumah tangga seperti pendapatan, jumlah anggota, dan pendidikan kepala keluarga (Wahyuningsih et al., 2017).

Kawasan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Arah Perubahan Konsumsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selisih pangsa pangan terlebar secara rata-rata terdapat di provinsi kawasan timur seperti Papua Tengah dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan pangsa pangan ibu kota tertinggi kedua dan penurunan kelompok berpengeluaran rendah yang lebih lambat daripada nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Kendari dan kabupaten sekitarnya seperti Konawe dan Konawe Selatan menghadapi tekanan daya beli yang lebih berat. Tekanan ini

berkaitan dengan karakter kawasan timur yang sebagian kebutuhan pokoknya dipasok antarpulau, sehingga biaya angkut laut, kepadatan jalan, dan arus perdagangan menentukan disparitas harga barang kebutuhan pokok di kawasan tersebut (Harahap & Adrison, 2023). Dalam kondisi tersebut, kenaikan harga beras pada 2024 diduga lebih cepat diteruskan kepada rumah tangga kota yang hampir seluruh pangannya dibeli dari pasar.

Pola di kawasan timur sejalan dengan pengalaman Bangladesh, tempat pergeseran dari dominasi serealia menuju pola pangan yang lebih beragam berlangsung seiring perbaikan ekonomi (Jia et al., 2023). Di Indonesia, pergeseran tersebut belum terlihat pada kelompok termiskin, karena pengeluaran masyarakat kota seperti di Samarinda pun tetap didominasi kebutuhan pokok (Hidayah et al., 2026). Bagi Sulawesi Tenggara, implikasinya terutama menyangkut protein hewani. Ikan merupakan kelompok protein hewani dengan pangsa pengeluaran terbesar pada semua kelompok pengeluaran, termasuk kuintil 1 (Tabel 2), sehingga keterjangkauan harga ikan menentukan kecukupan protein rumah tangga miskin di kota pesisir seperti Kendari. Ketika harga beras naik dan belanja rokok bertahan, pengeluaran untuk ikan berisiko menjadi pos yang dikurangi, sehingga ketahanan pangan rumah tangga miskin perkotaan bergantung pada stabilitas harga beras sekaligus harga ikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pola konsumsi rumah tangga di ibu kota provinsi berbeda secara konsisten dengan kabupaten di sekitarnya selama 2010 sampai 2026. Pangsa pangan di ibu kota selalu lebih rendah di setiap provinsi, sedangkan pangsa makanan jadi dan perumahan selalu lebih tinggi, dan kabupaten sekitar mengalokasikan bagian yang lebih besar untuk padi-padian dan rokok.

Selisih pangsa pangan antara ibu kota dan kabupaten sekitarnya menyempit, tetapi sebagian besar karena pangsa pangan di ibu kota naik, terutama di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Rumah tangga miskin membelanjakan lebih dari 60 persen pengeluarannya untuk pangan dengan kecenderungan meningkat, bergantung pada beras yang harganya melonjak, dan membelanjakan lebih banyak untuk rokok daripada untuk setiap kelompok protein hewani, dengan pangsa rokok mendekati gabungan ikan, daging, telur, dan susu.

Kenaikan pengeluaran nominal belum diikuti oleh penurunan pangsa pangan yang berarti. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data tingkat kabupaten dan kota agar perbandingan ibu kota provinsi dengan kabupaten sekitarnya dapat dilakukan secara langsung, serta menggunakan nilai riil untuk menilai perubahan kesejahteraan.

SARAN

Pemerintah daerah di provinsi dengan pangsa pangan ibu kota yang terus naik seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah perlu memprioritaskan stabilisasi harga beras dan bantuan pangan yang tepat sasaran bagi rumah tangga miskin perkotaan. Di Sulawesi Tenggara, kebijakan ketahanan pangan juga perlu menjaga keterjangkauan ikan sebagai sumber protein hewani utama sambil mendorong diversifikasi protein bagi kelompok berpengeluaran rendah.

Pengendalian konsumsi rokok perlu diintegrasikan dengan program perlindungan sosial melalui edukasi gizi dan pendampingan keuangan keluarga penerima bantuan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data mikro rumah tangga agar pengaruh harga, pendapatan, dan karakteristik rumah tangga terhadap pola konsumsi dapat diukur secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, J. J., Wiyono, V. H., & Samudro, B. R. (2019). Analisis pola konsumsi dan kemiskinan di Jawa Tengah. *Research Fair Unisri*, *3*(1), 132–138.

Akhmadi, A., & Engkur. (2026). Perubahan pola konsumsi masyarakat dalam perspektif ekonomi mikro. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(2), 1–9. https://doi.org/10.53697/emak.v7i2.3477

Alim, A., Adam, A., & Ashriady. (2023). Pola konsumsi makanan keluarga miskin perkotaan dalam pusaran kapitalisme nutrisi. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, *8*(1), 119–128. https://doi.org/10.30867/action.v8i1.809

Arif, M., & Sabilla, A. P. (2021). Pola konsumsi dan ketimpangan ekonomi masyarakat miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Semarang. *Prosiding 14th Urecol: Seri Ekonomi Dan Bisnis*, 148–158.

Badan Pusat Statistik. (2010). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi 2010 (Buku 3)*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2012). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2012 (Buku 3)*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2013). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2013 (Buku 3)*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2014 (Buku 3)*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2015 (Buku 3)*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2016). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Maret 2016 (Buku 3)*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2017*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2018*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2019*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2020*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2021*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2022*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2023*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per provinsi, Susenas Maret 2024*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia Maret 2025*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia Maret 2026*. Badan Pusat Statistik.

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2007). The economic lives of the poor. *Journal of Economic Perspectives*, *21*(1), 141–168. https://doi.org/10.1257/jep.21.1.141

Barrahmoune, A., & Matanle, P. (2026). Changes in Japan's food consumption footprints under human depopulation. *Cleaner and Responsible Consumption*, *21*, 100418. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2026.100418

Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. *The American Economic Review*, *70*(3), 312–326.

Habriyanto, Saijun, & Annisa, D. (2023). Analisis dampak pola konsumsi masyarakat miskin setelah kenaikan harga beras di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Student Research*, *1*(4), 323–332. https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jsr/article/view/1546

Hartari, A. (2016). Pola konsumsi masyarakat perkotaan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. In *Peran matematika, sains, dan teknologi dalam mendukung gaya hidup perkotaan (urban lifestyle) yang berkualitas* (pp. 29–58). Universitas Terbuka.

Hasibuan, L. S. (2016). Analisis pola pengeluaran rumah tangga miskin di Kabupaten Simalungun. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *16*(1), 38–55. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i1.1017

Hidayah, W., Astuti, R. F., Reza, Sudarman, & Ellyawati, N. (2026). Pola konsumsi masyarakat Kota Samarinda di era cashless society. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *9*(3), 22–37. https://doi.org/10.37329/ganaya.v9i3.5416

Houthakker, H. S. (1957). An international comparison of household expenditure patterns, commemorating the centenary of Engel's law. *Econometrica*, *25*(4), 532–551. https://doi.org/10.2307/1905382

Ismail, N. A., Daud, L., Mohd, S., Samat, N., & Ridzuan, A. R. (2023). Consumption pattern determinants of low-income household: Evidence from Malaysia. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, *57*(3), 33–48. https://doi.org/10.17576/JEM-2023-5703-03

Jia, M., Zhen, L., Yang, W., & Wang, S. (2023). Changing food consumption pattern and influencing factors in Bangladesh. *Foods*, *12*(2), 401. https://doi.org/10.3390/foods12020401

Kinanti, A. F., Maulana, M. S., & Yasin, M. (2024). Analisis pola konsumsi di Indonesia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, *3*(2), 19–32. https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2430

Li, Y.-P. (n.d.). Changing consumption patterns in China. In *Area studies, China: Regional sustainable development review (Vol. I)*. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS).

Manajit, S., Samutachak, B., & Voelker, M. (2020). Socio-economic determinants of consumption patterns in Thailand. *Asia-Pacific Social Science Review*, *20*(2), 39–51. https://doi.org/10.59588/2350-8329.1301

Pangaribowo, E. H., & Tsegai, D. W. (2011). *Food demand analysis of Indonesian households with particular attention to the poorest* (ZEF Discussion Papers on Development Policy). Center for Development Research (ZEF), University of Bonn. https://doi.org/10.22004/ag.econ.116748

Rossita, A., Masui, T., Tsuchiya, K., & Sekiyama, M. (2026). Assessing food consumption trends in Indonesia: Patterns and challenges for adoption of the desirable dietary pattern. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, *21*(2), 79–88. https://doi.org/10.25182/jgp.2026.21.2.79-88

Semba, R. D., Kalm, L. M., de Pee, S., Ricks, M. O., Sari, M., & Bloem, M. W. (2007). Paternal smoking is associated with increased risk of child malnutrition among poor urban families in Indonesia. *Public Health Nutrition*, *10*(1), 7–15. https://doi.org/10.1017/S136898000722292X

Soliman, A. A. (1994). Consumption patterns in Japan and the newly industrialized countries. In S. S. Hassan & R. D. Blackwell (Eds.), *Global marketing: Perspectives and cases* (pp. 359–380). The Dryden Press.

Swarnata, A., Kamilah, F. Z., Wisana, I. D. G. K., Meilissa, Y., & Kusnadi, G. (2024). Crowding-out effect of tobacco consumption in Indonesia. *Tobacco Control*, *33*(Suppl 2), s81–s87. https://doi.org/10.1136/tc-2022-057843

Wahyuningsih, Y. E., Mahrizal, & Masykur. (2017). Pola konsumsi non makanan rumah tangga miskin di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal E-KOMBIS*, *3*(2), 23–33.